# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia dalam hidupnya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka Allah SWT untuk menunjukkan kepada manusia dengan jalan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi hasil (*mudhārabah*) melalui sistem kerja sama. *Mudhārabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama1.

Dalam bermuamalah manusia yang satu dengan yang lain diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerjasama di antara sesamanya dalam melakukan hal baik. Karena dalam tolong-menolongakan mempermudah untuk mendapatkan segala kebutuhan. Dan janganlah umat Islam untuk bekerjasama dalam hal yang buruk. Karena sangat dilarang oleh Alquran sebagaimana tercantum dalam Al-quran surat Al- Maidah ayat 2:2 *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamumelanggar syiarsyiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan)bulanbulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan- hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa danpermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Adapun dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagihasil ini adalah berdasarkan Al-Qur‟an, hadist dan Ijma. Sebagaimanayang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat An-nisa ayat 29: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*.”3

Menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela. Menuruthukum Islam, kerjasama yang dilarang adalah kerjasama yang bertujuan buruk dan mengakibatkan terjadinya *gharar* (penipuan) dan bahaya*. Al- Syirkāh* secara etimologi bermakna pembauran dengan atau tanpa akad, biasdiartikan juga

1Afzalur Rahman*, Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003),380.

2 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan.* Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2004), 106.

3 Depertemen Algalmal RI, *All-Qur‟aln daln Terjemalhnyal*, 83.

1

investasi bersama4.

Kerjasama (*Syirkāh)* menurut bahasa adalah campur atau percampur5. Secara Istilah *Syirkāh* (Kerjasama) adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*)6 dalam *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* bahwasannya *Syirkāh* atau *syarikah* secara bahasa percampuran atau kemitraaan antara beberapa mitra atau perseroan7.

Sedangkan *mudhārabah* merupakan salah satu perserikatan Syirkāh, dan sama-sama memiliki tujuan mampu menghasilkan uang untuk orang biasanya kekurangan sekaligus keuntungan bagi pemilik modal yang kekurangan pengalaman agar terwujud kolaborasi dan sinergi yang bermanfaat antara keduanya. Kerjasama sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan dan memanfaatkan potensi alam danpotensi individu yang mereka miliki.

Ternak Lele disebut juga dengan budidaya ikan lele yakni merupakan suatu kegiatan peternakan dimana orang memelihara ikan lele untuk kemudian dijual. Ternak ikan lele relatif mudah dialkakukan budidayanya hal ini karena penyuplaian makanan ikan lele yang terbilang murah bagi pasar setempat. Dan budidanya juga dapat dilakukan ditempat yang relatif mudah baik kolam tembok, tanah, terpal, dan juga ditangki maupun disungai kecil8. Adapun Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih merupakan salah satu desa yang terdapatkerjasama ternak lele yang dilakukan antara pemerintah desa dengan warga sebagai pihak *pengingon*. *Pengingon* adalah pengelola yakni orang yang mengelolah ternak lele baik perawatan, pemeliharaan dan

pembudidayaan ikan lele.

Praktik kerjasama budidaya ikan lele di Karang Bandu, KapakTengah Prabumulih ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Diantara para peternak ikan lele tidak memberikan biaya mereka hanya memiliki tenaga dan keahlian dalam hal mengelola ikan namun mereka juga dibebankan lahan untuk tempat ternak ikan lele. Yang mana pihak pemerintah desa sebagai pihak pemberi modal namun dalam hal ini mereka *lepas tangan* atau tidak perduali sama sekali hanya memberikan modal sehingga untuk pengelolaan, perawatan bahkan penjualan dilakukanoleh pihak *pengingon* namun dalam hal pembagian keuntungan bagi hasil antara pihak pemerintah dengan warga *pengingon* diharuskan terlebih dahulu uang yang didapat diberikan kepada pihak pemerintah setelah dilakukan penjualan. Dan pihak pemerintah desa cenderung mengambil dana yang diberikan dahulu baru dibagikan kepada pihak *pengingon* dan untuk kerugian atas gagal panen pihak *pengingon* diharuskan membayar ganti modal penuh kepada pihak pemerintah desa karena mereka tidak ikutserta dalam pembebanan kerugian atas modal yang dipinjamkan maka 100% pihak *pengingon* yang harus mengganti ruginya.

Ada pola kerjasama yang dilakukan pihak pemerintah desa dengan *pengingon*.

4 Mushthafa al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy Syafi’i,* (Yogyakarta : Darul Uswah, tahun 2012) , 304.

5 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 125.

6 Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur:Prenadamedia Group, 2019), 97.

7 Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 97.

8Sarwendy, Sapto. *Cara Budidaya Ikan Lele Di Kolam Tembok”* Jawatani Media. Diakses di Google:https://web.archive.org/web/20201128100431/https://jawatani.com/cara-budidaya-ikan- lele-di-kolam- tembok/ pada tanggal 30 November 2022.

*Pertama,* ketika panen tiba si peternak ikan lele yang sekaliguspemilik lahan menjual hasil panen kepada suplayer (terkadang diambillangsung oleh suplayer) dan uangnya di berikan dahulu kepada pihakpemodal dengan di potong biaya produksi atau modal kemudian baru dibagi ke pihak *pengingon*. *Kedua*, semua hasil panen akan di jual pihak pengelola yang sekaligus pemilik lahan di bayar setelah hasil penjualan di potong biaya produksi, dan pemodal hanya memberikan modal tanpa ikut berkontribusi dalam pelaksanaan penjualan hasil panen dengan bagian yang didapatkan adalah 70% : 30% (30% untuk pengelola dan 70% untuk pemodal) namun pembagian hasil presentase bagi hasil tidak dijelaskan pada saat akad hal tersebut ditentukan setelah melakukan penjualan bukan pada kesepakatan di awal dimana pemodal mengatakan diawal pembagian hasil ialah 50% : 50%, yang harusnya 60% untuk petani/pengelola sedangkan 40% untuk Pemodal (Pemdes). *Ketiga*, akad kerjasama yang dilakukan hanya secara lisan tanpa tertulis dan apabila terjadi kegagalan panen ikan lele maka pihak pemodal tidak ikut serta dalam halpenanggungan terhadap kerugian yang diterima *pengingon* /pengelola dimana diharuskan diwajibkan untuk membayar ganti modal penuh kepada pihak pemerintah desa dan mereka tidak ikut serta dalam pembebanan kerugian ganti modal yang dipinjamkan kepada pihak Pengingon. Pada hal teknik bagi hasil *(mudhārabah)* dalam Islam adalah akadkerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul Maal*)menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadipengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaiansi pengelola, si

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut9.

Berdasarkan hal inilah, penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian serta penelitian lebih mendalam mengenai kerjasama ternaklele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah KabupatenPrabumulih. Meninjau secara hukum ekonomi syariah mengenai bagi hasil*(mudhārabah)*, syarat, rukun dan pelaksanaan *mudhārabah* yang dilakukanan apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah ataubelum. Sehingga bagi hasil *(mudhārabah)* kerjasama antara pemerintah desa dengan *pengingon* tersebut mendapatkan hukum pasti ditinjau dariHukum Ekonomi Syariah. Sehingga penulis ingin mengangakat haltersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum EkonomiSyariah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Ternak Lele Antara Pemerintah Desa Dengan Warga Sebagai *Pengingon* Di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih”.**

## Rumusan Masalah

* 1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih?
	2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *Pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih?

## Tujuan Penelitian

9 Muhammad Syafi‟I, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 4.

* 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.
	2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

## Manfaat Penelitian

* 1. Manfaat Teoritis

Manfaat terotitis penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + 1. Mengetahui dan memperjelas bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih
		2. Memberikan informasi dan wawasan dalam dunia pendidikan dan kepada masyarakat *pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.
		3. Hasil penelitian ini mampu menjadi salah satu sumber referensi untuk menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis yang akan datang.
		4. Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan ekonomi dalam memperkaya pengembangan dibidang ilmu ekonomisyariah.
	1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + 1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan memperluas wawasan serta kepustakaandan untuk meningkatkan kualitas diri.
		2. Memberikan informasi serta wawasan kepada masyarakat dan pembaca mengenai pelaksanaan kerjasama ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

## Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian pustaka ditemukan beberapa penelitian yang telah membahas tentang kerjasama bagi hasil *(mudhārabah)* di masyarakat beberapa diantaranya: *Pertama,* Yola Kaselia mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah (Muamalah) Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, skripsi ini menjelaskan praktik kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan diawal perjanjian serta adanya ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan yang dilakukan pada salah satu pihak yang berakad yang terjadi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan10 .

10 Yola Kaselia, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 202.

Penelitian oleh Yola Kaselia membahas tentang pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) dengan di Analisis dari Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele yang dilakukanantara pemerintah desa dengan pihak *pengingon* serta kerugian yang diterima *pengingon* /pengelola akibat akad kesepakatan diawal yang tidak jelas sehingga adanya pembebanan kerugian ganti modal penuh ketika terjadinya panen gagal ternak ikan lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

*Kedua,* Abdur Rohman A mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, skripsi ini menjelaskan pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat- menyurat dan saksi dari aparat Desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Dan Hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasil nya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pengelola tanpa di bagi11. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak *pengingon* serta kerugian yang diterima *pengingon* /pengelola akibat akad kesepakatan diawal yang tidak jelassehingga adanya pembebanan kerugian ganti modal penuh ketika terjadinya panen gagal ternak ikan lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

*Ketiga,* Jinne mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” skripsi ini menjelaskan Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dari perspektif Ekonomi Islam12. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak *pengingon* serta kerugian yang diterima *pengingon* /pengelola akibat akad kesepakatan diawal yang tidak jelas sehingga adanya pembebanan kerugian ganti modal penuh ketika terjadinya panen gagal ternak ikan lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

*Keempat*, Nunnah Astutik mahasiswi jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022 dalam

11 Abdur Rohman A, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

12 Jinne, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2020.

skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, skripsi ini menjelaskan mengenai praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan akad shirkah inan antara pihak pertama dan pihak kedua. Dimana kerjasama dalam pengelolaan ini modal dan kerugian ditanggung bersama yaitu sama-sama 50%. Namun dalam kerjasam ini hanya pihak kedua saja yang merawat kolam ini karena dirasa pihak keduamodalnya dipinjami oleh pihak pertama dulu. Menurut Islam ini adalah kegiatan yang baik karena adanya prinsip tolong menolong. Namun dalam Hukum Islam belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu ma’qud alaih(Aset, Usaha, dan Profit) yaitu karena usaha yang dilakukan dalam kerjasama pengelolaan kolam ini hanya salah satu pihak yaitu pihak kedua13. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak *pengingon* serta kerugian yang diterima *pengingon* /pengelola akibat akad kesepakatan diawal yang tidak jelas sehingga adanya pembebanan kerugian ganti modal penuh ketika terjadinya panen gagal ternak ikan lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

*Kelima,* Tria Kusumawardani mahasiswi jurusan Mu‟amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ditinjau menurut konsep Mudhārabah” skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya.Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber rejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masingmasing14. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak *pengingon* serta kerugian yang diterima *pengingon*

/pengelola akibat akad kesepakatan diawal yang tidak jelassehingga adanya pembebanan kerugian ganti modal penuh ketika terjadinya panen gagal ternak ikan lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

13 Nunnah Astutik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022.

14 Tria Kusumawardani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ditinjau menurut konsep mudharabah*, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

Dari penelitian-penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis saat ini. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kerjasama bagi hasil. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini ialah terletak pada subjek penelitian.

## Metodologi Penelitian

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian hukum empris. penelitian hukum empris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat15.

* 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Menggunakan Penelitian Normatif Empiris, Karena menggunakan data sekunder ditambah dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian Normatif yaitu suatu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat16. Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

* 1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

* 1. Sumber data
		1. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*)17. Yaitu sumber data yang diperoleh melalui wawancara masyarakat Kelompok peternak lele, aparat pemerintah desa, Tokoh agama, tokoh adat di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih, Sebagai suatu Sumber dari penelitian ini. Narasumber Yang diambil dalam Penelitian Terdapat 15 Responder Yaitu 3 pemilik kolam, 3 orang perangkat Desa dan 9 orang Pengingon

* + 1. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis18. Dan sumber data yang diperoleh melalui buku-buku tentang muamalah,hukum ekonomi syariah, kerjasama, jual beli, dan dokumen apa saja yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

* 1. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik analisis data ialah metode dalam memproses data menjadi informasi. Proses analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses untuk menelusuri atau mengatur secara sistematis data yang akan diperoleh dilapangan melalui wawancara secara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehinnga mudah dipahami.19

15Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 110.

16Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah mada Universiti Pers, 2012), 104.

17 M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi danPublikserta Ilmu- Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

18 Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakrta: Pusaka Belajar Offst, 1998), 91.

19 Helaluddin Hengki wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan & Praktik*,(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray), 2019, 102.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

* + 1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak guna mengetahui secara langsung tentang peran aparat pemerintah desa dengan warga dalam kerja sama bagi hasil ternak ikan lele.

* + 1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek penelitian.

* + 1. Dokumentasi

Dokumentasi yakni salah satu teknik untuk mengumpulkan datayang sudah tersedia dalam bentuk-bentuk dokumen, foto dan lain-lain.

Penulis menggunakan metode berfikir deduktif, metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menggunakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian- bagiannya yang khusus20.

* 1. Metode Analisi data

Metode analisi data yang digunakan pada penelitian ini megunakan metode analisis Deskriptif Kualiatif, yaitu suatu yang menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.21

## Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, antara lain:

# BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada dilapangan dan akan diteliti. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

# BAB II TEORI UMUM TENTANG KERJASAMA

Bab ini membahas tentang kerangka teori akad kerjasama (*Syirkāh*) menurut hukum Islam dan perspektif dari Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya tentang Pengertian kerjasama, dasar hukum kerjasama bentuk-bentuk kerjasama (*Syirkāh*), Transaksi Bagi Hasil (*Mudhārabah*), serta berakhirnya Mudhārabah.

# BAB III GAMBARAN UMUM DESA KARANG BINDU KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH KABUPATEN PRABUMULIH.

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai wilayah yang menjadi objek penelitian yang berisi tentang sejarah singkat dan visi misi Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

# BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA

20 Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta:Pranada Media Group), 2015, cet. Ke-2, 17-18.

21 Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakrta: Pusaka Belajar Offst, 1998), 91.

# BAGI HASIL TERNAK LELE ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN WARGA SEBAGAI *PENGINGON* DI DESA KARANG BINDU KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH KABUPATEN PRABUMULIH

Bab ini membahas mengenai bagaimana kerjasama ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di desa karang bindu kecamatan rambang kapak tengah kabupaten prabumulih dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai *pengingon* di desa karang bindu kecamatan rambang kapak tengah kabupaten prabumulih.

# BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang merupakan akhir dari keseluruhan penulisan proposal penelitian. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang menjadi permasalahan. Dan juga dikemukan saran- saran mengenai objek penelitian tentang jual beli untuk kemajuan hubungan sosial antar umat, dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

# BAB II TINJAUAN UMUM

## Hukum Ekonomi Syariah

* 1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat peraturan yang terdapat anjuran atau perintah, larangan serta sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kegiatan perekonomian. Menurut Rachmat Soemitro Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling membutuhkan.22

Menurut Mustafah Edwin Nasution, Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu peraturan untuk menjalankan kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran Islam. Aturan tersebut yaitu di bidang Agama, sosial, politik, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian.23

Hukum Ekonomi Syariah mengatur sejumlah Lembaga Ekonomi yang mengalami perkembangan, lembaga keuangan syariah yang dimaksud, meliputi bank syariah, lembaga keuangan Mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, Obligasi dan surat berharga, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) . 24

## Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum ekonomi syariah terdiri dari berbagai macam sebagai berikut:

* + 1. Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai wahyu Allah SWT. Dan merupakan dasar hukum utama.Terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ ال ِ'رٰبوا لََ يَقُوْمُوْنَ اِلََّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْٰطنُ مِنَ الْمَ ِ ِّۗ'س ٰذلََِ بِاَََُُّّْْ اََلُ ْ˜وا اِمَََّّا الْبَيُُْ مُُِْْ ال ِ'رٰبواۘ

وَاَحََُّۤ هاللُّٰ الْبَيَُْ وَحَرَّمَ ال ِ'رٰبو اِّۗ فَمَنْ جَاۤءَه ٗ مَوْعِظَةٌ ِ'منْ رَّبِ'ه ,ٗ فَاتََّْٰىُ فَلَه ٗ مَا سَلَ فَِّۗ وَاَمْرُه ٗ ˜ٗ اِلَى هاللِّٰ ِّۗ وَمَنْ عَادَ فَاُوٰلىََِٕ اَصْٰحبُ النَّارِ ۚ هُْْ فِيْاَُ ٰخلِدُوْنَ

*Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.25*

* + 1. Hadits

Hadits adalah sesuatu baik berupa perkataan atau ucapan serta perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. 26

أَدِ' الَأمَاةَََّ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَََ، وَلََ تَخُنْ مَنْ خَاَََّ

22 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media group, 2016), 29.

23 Mustafah Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

24 Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 3.

25 Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Juz 1-30*, (Solo: Abyan, 2014), 47.

26 Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami’ Ash-Shahih Sunan At-Tirmidzi*. ed Muhmud Mohammed Nassar, (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, cet. 4, 2013) , 292.

10

*Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu dan janganlah kalian membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan”* (HR. Abu Daud & Tirmizi)

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اُلله عَنْهُ اََلَ: اََلَ رَسُولُ اََّللِّٰ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلََّْ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اَلله وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِ'مًا شَقَّ اََّللُّٰ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَاَلتِ'رْمِذِيُّ وَحَسَّنَه

*Artinya: Dari Abi Shirmah radhiallahu ‘anhu beliau berkata, Rasulullah* ﷺ *bersabda, “Barang siapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barang siapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah*

*akan menyusahkan dia.27*

* + 1. Ijma

Ijma’ adalah pendapat atau Fatwa-Fatwa yang berasal dari para ulama yang

telah disetujui bersama yang berlandaskan Al-Qur’an.

Seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI).

* + - 1. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
			2. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Gadai).
			3. Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah.*
			4. Fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Murābahah*. Dan Fatwa DSN lainnya.
			5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum terdapat beberapa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

*Pertama*, Prinsip ketuhanan (*Ilahiyah*), yaitu dalam setiap kegiatan hukum ekonomi mesti berdasarkan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur’an. *Kedua*, Amanah yaitu seluruh aktivitas ekonomi yang dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab.28 *Ketiga*, keadilan dan menghindari kezaliman, kegiatan muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. *Keempat*, kebebasan transaksi artinya kegiatan perekonomian atas dasar saling rela antara para pihak. Kelima, halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara memperolehnya, maupun manfaatnya. Keenam, pelanggaran riba.

## Kerjasama

* 1. **Pengertian kerjasama**

Menurut KBBI dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.29

27 Hr. Abu Dawud No. 3635, Tirmizi No. 1940 dan Dihasankan Oleh Imam Tirmizi

28 Nila Oktasari, *“Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Biro Jasadalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Biro Jasa Cv. Balantika Batu Raja)”* (Skripsi,; FSH UIN Raden Fatah, 2021), 21-22.

29[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama,](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama) diakses 25 Januari 2024, pukul 19:13 WIB.

Di dalam Islam bentuk kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang pada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam, praktek kerjasama bagi hasil seperti ini termasuk dalam kategori Muḍārabah. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang bergerak di bidang usaha untuk mmperoleh keuntungan bersama. Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan.

## Landasan hukum kerja sama

Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari’at (maqashid as-syari’ah). Dasar hukum yang menjelaskan tentang kerjasama dalam Al- qur’an Surat Shad (38) ayat 24 yaitu:

اََلَ لَقَدْ ظَلَمَََ بِسُؤَالِ عََّْجَتََِ اِٰلى عََِّاجِه ,ٗ ِّۗٗ وَاِنَّ كَيِْْرًا ِ'منَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُُُْْ عَٰلى بَعْ „ض اِلََّ الَّذِيْنَ ٰامَنُوْا وَعَمِلُوا ال هصلِٰحتِ وَلََِيٌُْ مَّا هُ ِّْْۗ وَظَنَّ دَاو دُٗ اَمَََّّا فَتَنههُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّه ٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَاََّبَ

*Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing- kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.*

Maksudnya adalah Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada pandangan mereka, jika salah seorang sekutu menghianati temannya Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Di dalam praktek kerjasama tentunya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemodal dan juga pihak pengelola. Pemodal adalah orang yang memberikan modal atu menanamkan modalnya dalam suatu bidang usaha atau disebut juga sebagai shahibul amal. Sedangkan pengelola yaitu orang yang menjalankan usaha dalam suatu kerjasama atau disebut juga dengan mudharib.

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughowi mudharabah berasal dari kata ad-dharb (الضرب )

derivasi dari wazan fi’il ضربا- يضرب- ضرب berarti memukul dan berjalan. Selain ad-

dharb ada juga qiradh (القراض )dari kata (القرض ) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.30

## Teori kerja sama dalam Islam (mudharabah)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehannya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah

30 Adib Bisri, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 432.

merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar. Salah satunya adalah mudharabah.31 Salah satu bentuk kerja sama dengan jalan bermuamalat adalah kerjasama dan

bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah pelaku (shahibul maal dan mudharib). Obyek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul), keuntungan (Nisbah). Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah Shahibul maal dan mudharib syaratnya adalah baligh dan berakal, Sighat ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.32

Modal syaratnya adalah modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. (Ascarya, 2014: 62). Nisbah atau keuntungan syaratnya adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk presentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.33

Pada akad kerjasama ini dapat memudahkan orang untuk menjalankan suatu usaha karena satu pihak memiliki kelebihan modal, namun tidak bisa mengelola modal, disamping itu seseorang juga dapat mendapatkan pekerjaan karena satu pihak tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk bekerja. Syariat memperbolehkan kerjasama ini, agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan satu sama lain, dengan demikian akan terwujudlah kemaslahatan bagi keduanya.

## Bagi Hasil

* 1. **Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing. Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”34 Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal *(shahibul maal)* dan pengelola *(mudharib).35*

Jhon L Epsosito dalam bukunya Veithzal yang berjudul *Islamic Banking*

32 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 143.

33 Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 206.

34 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

35 Syafi’I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah berbagi keuntungan atau prinsip berbagi keuntungan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada awal dengan kemungkinan untung dan rugi.36

Menurut Ari Kartiko dalam Jurnal Ekonomi Syariah, bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua-duanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan dengan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk presentase nisbah bagi hasil37 Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama

di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak atau lebih. Di dalam aturan syariah, yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan *(An-Tarodhin)* di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.38

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana).

## Landasan Hukum Bagi Hasil

Secara syar’i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al- Qur’an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

1. Al-Qur’an

ٰيَ˜أَيُّاَُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لََ تَأْكُلُ ˜وا۟ أَمْٰوَلَكُْ بَيْنَكُْ بِٱلْٰبَطُِِ إِ َّ ˜لَ أَن تَكُونَ تِٰجَرَةً عَن تَرَا „ض ِ'منكُْْ ۚ وَلََ تَقْتُلُ ˜وا۟ أَفَُّسَكُْْ ۚ إِنَّ ٱَََّّ كَانَ بِكُْْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah* kamu *membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”39* (Q.S An Nisa: 2)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas

36 Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2010), 805

37 Ari Kartiko, Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam “*Journal of Sharia Economics*”, Vol. 2, No. 1, (2019), 18

38 Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18

39 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (surah An-Nisa ayat: 10-11)

saling ridha, saling ikhlas.

1. Landasan Hukum Menurut UU

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 24, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito,tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak- pihak yang melakukan perjanjian. Pada konsep bagi hasil, keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepatakan sebelumnya antara pihak satu dan pihak lainnya yang terkait. Dalam Ekonomi Syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemilik dana menanamkan dananya kepada pihak lain sebagai pengelola dana
2. Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana)
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.40

## Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Menurut Abdul aziz dahlan sebuah akad, musyarakah dan mudlarabah mempunyai syarat dan rukun yang mempengaruhi keabsahannya. Musyarakah akan menjadi akad sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.41

Rukun dan syarat Musyarakah adalah sebagai berikut:

### Rukun Musyarakah

* + 1. Macam harta modal.
		2. Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan.
		3. Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.

### Syarat Musyarakah

* + 1. Melafadzkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
		2. Anggota syarikat percaya mempercayai.
		3. Mencampurkan harta yang akan disyarikatkan.

Rukun dan syarat Mudharabah adalah sebagai berikut:

### Rukun Mudharabah

* + - * 1. Malik atau shahibul maal ialah yang mempunyai modal.
				2. Amil atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal.
				3. Amal, ialah harta pokok atau modal.
				4. Shighat atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.

### Syarat Mudharabah

* + - * 1. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.

40 Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

41 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Batu Van Hove), hlm. 195.

* + - * 1. Melafadzkan ijab dari yang punya modal, dan qobul dari yang menjalankannya.
				2. Diterapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan mudharib.
				3. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.

Adapun berikut bagi hasil secara umum, mencakup sebagai berikut:

Pelaku

Pelaku dalam hal ini adalah pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam bagi hasil harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau’amil*).

Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkankerjanya sebagai objek *mudharabah*.

Ijab Qabul

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat kan diri dalam akad *mudharabah*. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangi oleh kedua belahpihak.

Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.42

1. Syarat
	1. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harusorang yang bertindak atas nama hukum.
	2. Berkaitan dengan modal, yaitu:
2. Berbentuk uang
3. Jelas jumlahnya
4. Tunai
5. Diserah sepenuhnya kepada yang mengelola Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.43

## Bentuk-Bentuk Bagi Hasil

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, terdapat empat bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil, yaitu *Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah,* dan *Musaqah.* Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya menggunakan kontrak kerja sama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah.* Karena kedua konsep lainnya yaitu *Muzara’ah* dan *Musaqah* pada pokok pembahasannya lebih khusus kepada peihal lahan dan pertanian.

* 1. *Musyarakah*
		1. Pengertian *Musyarakah*

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah. Musyarakah*

menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath”* yang artinya campur atau percampuran.

42 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2013, 205

43 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 206

Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.44

Secara etimologis, *Musyarakah* adalah pengabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa inggris disebut *partnership.*45 Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *Syirkah* antara lain:Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

* + - 1. Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hak hak dan *tasharruf.* Menurut Mazhab syafi’i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.46
			2. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
			3. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakanakad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.47

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.48

Menurut Fatwa DSN-MUI, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing- masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan25.

Berdasarkan pengertian *Musyarakah* diatas *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing- masing memberikan konstribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.49

* + 1. Dasar Hukum *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’.

* + - 1. Al-Qur’an

Adapun yang menjadi dasar hukum *musyarakah* antara lain:

اََلَ لَقَدْ ظَلَمَََ بِسُؤَالِ عََّْجَتََِ إِلَٰى عََِّاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَيِْرًا ِ'منَ ٱلْخُلَطَا˜ءِ لَيَبْغِى بَعْضُُُْْ عَلَٰى بَعْ „ض إِلََّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلٰصَّلِٰحَتِ وَلََِيٌُ مَّا هُْْ ِّۗ

وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَمَََّّا فَتَٰنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَاََّبَ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian*

44Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

45Mardani, *Hukum Bisnis Syariah,* (Jakarta:Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 142.

46 Mas’adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 191.

47Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2017), 125.

48 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group,2012), 218.

49 Widyarini dan Syamsul Hadi, *Fatwa MUI PSAK dan Praktek Musyarakah*, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Februari 2018, 126.

* + - 1. Hadist

*yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

إنَِّٗ اَلله تَعَالَى يَقُولُ : أَاََّ ثَالِثٌ الشَرِيكَينِ مَالَْ يَخُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَاخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجتُ مِن بَينِمَُِا

Artinya: *“Aku (Allah) adalah orang ketiga diantara dua orang yang saling bersyirkah (musyarakah) selama salah satu keduanya tidak menghianatikawannya dan ketika sudah ada yang menghianati maka aku (Allah) akan keluar dari antara mereka”*

* + - 1. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum

muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.50

* + 1. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dari *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalamtransaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Pelaku akad, para mitra usaha
			2. Objek akad, modal usaha
			3. *Shighat,* Ijab dan Qabul
			4. Nisbah keuntungan (bagi hasil).51

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut52:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
	1. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalahharus dapat diterima sebagai perwakilan.
	2. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak,misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
	1. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
	2. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupunberbeda.
3. sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan:
	1. modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama
	2. bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.
	3. bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syurkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

50Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek,* ,91

51 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres,2013), 52.

52 Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

* + 1. Jenis-jenis *Musyarakah*

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan *musyarkah* akad (*syirkah al aqad*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagipula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Musyarakah* akad tercipta karena cara kesepakatan,dimana dua pihak atau lebih setujuh bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah,* serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.53

* + - 1. *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukankarena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh sebab itu *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua:

* + - * 1. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduannya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
				2. *Syirkah jabar* (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.54
			1. *Syirkah Uqud*

*Syirah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Tasarruf* yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah uqud* keuntungan yang di peroleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.
2. Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing- masing anggota *musyarakah* nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan mauqud alaih rukun dari *musyarakah.*
3. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuanmisalnya untuk A 200, B 500. jika

53 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 211.

54 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol 5,* (Jakarta: Gema Insani,2011), 443.

keuntungan telah ditentukan, maka akad syirkah menjadi *fasid*. Karena syirkah mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan mengholangkan hakikat perkongsian.55

* 1. *Mudharabah*
		1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fi ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah*dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.56 Secara terminologi *mudharabah* adalah menyerahkan harta yang tertukar kepadaorang yang akan memutarnya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.57 Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa diartikan berpergian.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihakyang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena hartadiserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik moadal (harta)dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.58

Zuhaily mengemukakan, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).59

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan : modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.60

* + 1. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

55 Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah,* (Semarang:IAINWalisongo Pres, 2010), 34

56 Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 205

57 Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: DarulFalah, 2005),

614

58 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 138

59 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141

60 Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 90

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul,yakni lafazh yang menunjukan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah, muqaridhah, muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.61

Menurut ulama Syafiiyah rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:62

* + - 1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul mal*)
			2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
			3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
			4. Mal yaitu harta pokok atau modal
			5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
			6. Keuntungan.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu: *‘aqidyni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma’qud ‘alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).36 Rukun *mudharabah* adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah, keuntungan, dan *shighat* atau akad.

1. Pemodal dan Pengelola
	1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
	2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan wakil dari masing- masing pihak.
	3. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.63
2. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah.* Untuk itu, modal disyariatkan harus64 :

* 1. Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya yaitu mata uang. Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
	2. Harus berbenuk tunai bukan piutang, namun sebagian ulama membeolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdaganganmisalnya *inventory*
	3. Harus diserahkan kepada *mudarib* untuk memungkinkannya melakukan usaha
1. Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah

175

175

61 Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* 226

62 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 139

63 Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi diLembaga Keuangan Syariah*,

64 Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi diLembaga Keuangan Syariah*,

satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itulah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Labih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang tidak terikat dengan usaha penanaman modal karena itu berarti memusyawarahkan antara usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:65

* 1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
	2. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yangada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.

Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehinga bukan hanya dengan pembagian saja, tetapi agar hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

Keuntungan adalah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut :

1. Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
2. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya
3. Rasio presentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dandituangkan dalam kontrak
4. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudarib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul mal*.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi

*mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal harus tunai
2. Modal harus jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan
3. Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas presentasenya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
4. *Mudharabah* harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu atau ketentuan lain.66
	* 1. Jenis – jenis *Mudharabah*

Dalam kaitannya dengan pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh

65 Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,*

176

66 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 218-219

pengusaha, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi akad *mudharabah muthlaqah*

dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah macam-macam dari*mudharabah* :

* + - 1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah al-muthlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. *Sahib al-mal* memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha, tidak membatasi tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha kepada *mudharib*. Misalnya *shahibul mal* berkata, “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.*”67

Dalam akad *mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.68

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam*mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.69 Tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* melakukan kelalaianatau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.70

Ketentuan yang harus ada dalam *mudharabah muthlaqah* yaitu:

1. pendapatan atau keuangan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yangtelah disepakati di awal akad
2. Pemilik akad tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya
3. Penetapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpuanan dana, yaitutabungan *mudharabah*

67 Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 227

68 Hasni Ahmad Said & Faturrahman Rauf, Radikalisme Agama Dalam Perspektif HukumIslam*, “Al- ‘Adalah Jurnal Hukum Islam”*, (Fakultas Syari‟ah UIN RIL, Vol.XII, No.3, Juni 2015), 495

69 Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 1197

70 Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 149

dan deposito *mudharabah*

1. Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yangdisepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
2. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, 1, 3, 6 atau 12 bulan.
	* + 1. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu,dan lain-lain.71

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*ristriced*), pemilik dana (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.72

Jika *mudharabah* dilaksanakan dengan batasan tempat, maka *mudharib* tidak boleh bekerja selain di tempat yang sudah disyaratkan oleh *shahibul mal.* Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan karena setiap tempat memiliki perbedaan dalam hal murah dan mahalnya barang yang dimiliki suatu resiko perjalanannya.73 Jika pemilik modal berkata, “ dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya,” maka syarat (batasan) tersebut adalah sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena syarat itu dapat memberi faedah untuk menambah kepercayaan kepadanya dalam muamalah.74 Apabila pemilik modal menentukan waktu *mudharabah* dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya.Dalam hal ini akad tersebut sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*) maka waktu *mudharabah* menjadi tertentu dengan

adanya batasan tersebut.75

Pada *mudharabah muqayyad*, terdapat hak-hak *mudharib* yang harus dipenuhi oleh shahibul mal. Sejumlah ulama seperti Ibrahim an- Nakha‟i dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya baik ketika menetap maupun sedang berpergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya Abu Hanifah, Malik, dan Shi‟ah Zaidiyah berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya ketikasedang berpergian dan tidak berhak

71 Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah,* 227

72 Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 52

73 Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani,*(Jakarta: Gema Insani, 2011), 501

74 Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 502*

75 Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 503*

saat sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari *mudharabah*. Biaya tersebut mencakup seperti apa yang dibutuhkan oleh *mudharib* seperti makanan dan pakaian.76

* + - 1. Hak dan Kewajiban *Shahibul mall* dan *Mudharib*
1. Hak dan Kewajiban Pemilik modal77 :
	1. Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 100%
	2. Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang diberikan kepada pengelola
	3. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.
	4. Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja
	5. Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama
	6. Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Hak dan Kewajiban Pengelola

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hal dalam akad *mudharabah,* yakni nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan.

Berikut beberapa pendapat para ulama diantaranya:78

Menurut Imam Syafe’i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah,* baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena *mudharib*, kelak akan mendapatkan keuntungan. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukumnya fasid.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudhraib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan, maupun pakaian. Madzhab Hanabilah memberikan keleluasaan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan akad.

76 Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 504*

77Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), [http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04.surat-](http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04.surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m%3D1) [perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1,](http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04.surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m%3D1) diakses 19 Februari 2023.

78 Jaih Mubarok, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 164

Menurut Hanafi‟yah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi : makan, minum, pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisinis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku dikhalayak umum.

Biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* (dalam menjalankan bisnis) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika tidak ada keuntungan, akan dikurangi dari aset *shahibul mall* dan dihitung dari kerugian. Jika *mudharib* melakukan pejalanan bisnis diambil dari aset *mudharabah.* Ketika ia kembali, jika terdapat biaya sisa perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset *mudharabah.* Jika *mudhrabah* menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi untung dan akan dikurangkan dari aset *mudharabah.*

Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudhraib* menyerahkan aset yang diserahkan *shahibul mall* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi mayoritas ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul mall,* dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibulmall.* Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai sengan kesepakatan.79

* + - 1. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*

*Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut80:

1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkansebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhakmenerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola (*mudharib*) dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal (*shahibul mal*) meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal

Disisi lain, Zuhaily mengatakan *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal

79 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* 104-105

80 Neneng Nurhasanah, *Mudarabah`Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 76

(*shahibul mal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, mudharib tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahibul mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *shahibul mal, shahibul mal* harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang disewa tenaganya) dan *mudharib* berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun kerugian.81

Selain ini dalam buku Rachmat Syafe‟i, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah,* larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan. *Mudharib* diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.

1. Salah seorang *akid* meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang *akid* meningal dunia, baik pemilik modal maupun pengelola. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.
2. Salah seorang akid gila, jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah.*
3. Pemilik modal *murtad*. Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung denganmusuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelinya, menurut ImamAbu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung denganmusuh sama saja dengan mati, hal ini menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan diantara para ahli warisnya.
4. Modal rusak ditangan pengelola. Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengelola.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.82

81 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* 148

82 Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah,* 2237

## Metode Perhitungan Bagi Hasil

1. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yangtelah disetujui dengan pendapatan bruto.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan. Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.83

1. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperolehkeuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka :

* 1. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- (90% x(Rp 10.000.000,-

— Rp 9.000.000,-.))

* 1. Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- (10% x(10.000.000,- ─ 9.000.000,-).84

## Definisi Peternak

Peternak merupakan pengusaha hewan ternak. Di Indonesia, hewan ternak biasanya berupa sapi, kambing, domba, ayam, kalkun, bebek, ikan hias, ikan air tawar, lobster air laut, dan sebagainya. Peternak membudidayakan hewan ternak di ladang atau padang peternakan tergantung dengan hewan yang diternak.

Selain pemeliharaan, seorang peternak akan juga bisa terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangbiakan seperti inseminasi buatan dan membantu dalam proses kelahiran hewan ternak, yang bercita-cita menjadi peternak juga harus memiliki pengetahuan tentang pakan ternak, supaya hewan ternakmu tumbuh dengan baik.

Seorang peternak bisa menjual hasil ternaknya secara langsung maupun diolah menjadi bahan makanan atau produk lain yang punya nilai jual. Jadi, seorang peternak ayam bisa menjual ayam dari peternakannya dalam bentuk hewan hidup, ayam potong, ayam beku atau bahkan telah diolah menjadi *chicken nugget*. Nah, jika ingin mendapatkan keuntungan lebih tentu seorang peternak juga harus melebarkan sayapnya pada industri pengolahan hasil ternak.85

83 Ismail, *Perbankan Syariah*, 98

84 Ismail, *Perbankan Syariah*, 99

85 https://campus.quipper.com/careers/peternak, diakses 29 Januari 2024, Pukul 08:06 WIB.

# BAB III GAMBARAN UMUM

## Sejarah Singkat Keadaan Geografis Wilayah

Desa Karang Bindu Berdasarkan Sejarah Sudah ada Lebih kurang 300 Tahun lalu Puyang Tageri Juriat Puyang Singe Patih Keban Baru Rambang Penegak dan Pendiri Talang Tulang Babat dan berkembang dengan juriat anak Cucung masing-masing mendirikan talang-talang cikal bakal dari Dusun Pehabung Uleh, Tanjung Raman, Sukaraja, Karang Raja, Muara Dua dan Dusun Gunung Kemala.

Pehabung Uleh berubah menjadi Peraboeng ngoeleh dan pada pendudukan jepang berubah lagi menjadi Peraboeh Moelih dengan ejaan sekarang menjadi Prabumulih Pada masa kurang lebih 250 tahun yang lalu Dusun Pehabung Uleh masih bernama Lubuk Bernai yang dipimpin seorang Kerio bernama Keri Budin dan Kepala Menyan adalah Puyang Dayan Duriat Puyang Tegeri dibantu Minggun, Resek, Jamik, menemukan tempat tanah yang meninggi (Mehabung uleh) kemudian ditetapkan oleh mereka berempat (Dayan, Resek, Minggun, dan Jamik) untuk mendirikan kampong dengan diiringi keturunan masing-masing menghadap tanah yang Menghabung Uleh (Meninggi / Bertambah) dengan nama Kebur Bunggin, Anggun Dilaman, Kumpai Ulu dan Karang Lintang. Dengan kesepakatan mereka dusun ini dengan empat kampung disebut Pehabung Uleh berpegang pada aturan adat Simbur Cahaya.86

termasuk didalam wilayah Marga Rambang Kapak Tengah dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Rambang yang tergabung dalam wilayah Pemerintahan Onder Afdeeling Ogan Ulu dengan status Pemerintahan Marga meliputi Marga Lubai Suku I, Marga Lubai Suku II dan Marga Rambang Kapak Tengah yang dipimpin oleh Pasirah.87

Berdasarkan Cerita leluhur bahwa pada zaman dahulu ada seorang pengembara yang datang dari dusun selincak yang bernama Krungkli dan karena kemarau panjang Krungkli memutusakan untuk berpindah ke Berancak (desa di atas tebing) dan setelah tinggal di berancak ternyata masih mengalami kemarau lagi ialah kemudian pindah ke dusun karangan dan setelah menetap di dusun karangan terjadilah kebarakan hutan yang membakar setengah pemukiman warga kemudian Krungkli memutuskan untuk bertalang di Talang Bindu.88

Pada tahun 1869 Talang Bindu itu di bentuk menjadi Dusun Karangan Bindu dikarenkan sebagian warga Dusun Karangan banyak yang tinggal di Karangan Bindu akibat kebakaran Dusun Karangan dahulu. Dan pada tahun 1870 terjadilah yaitu pembentukan krie yang pertama Mat adi menjabat menjadi krie sampai 1897 terjadilah pemilihan krie lagi ialah adek nya Mat adi yang bernama Arnan yang menjabat dari 1897 sampai 1938, wafatlah krie arnan sehingga di gantikan oleh adik nya yang bernama H. komar Bin Nasarudiin sampai 1970. Setelah itu tahun 1970 diadakan Pemilihan krie dan

86 Wawancara dengan H. Wahnu Agustani (sesepuh Desa Karang Bindu) pada pukul 10.00 WIB hari Jum’at, 28 Juli 2023

87 Wawancara dengan H. Wahnu Agustani (sesepuh Desa Karang Bindu) pada pukul 10.00 WIB hari Jum’at, 28 Juli 2023

88 Wawancara dengan H. Ali Mangku (Toko Masyarakat Desa Karang Bindu) Pada Pukul 09.00 WIB Hari Minggu, 30 juli 2023

29

terpilihlah Don Herli Bin H. Masnur Saputra yang merupakan Krie Terakhir di Desa Karang Bindu89

Sebelum masa orde baru, wilayah ini masih dinamakan Marga dengan luas 240.000 km2 yang dipimpin oleh seorang Pasirah. Dan setelah orde baru sampai dengan sekarang wilayah ini dinamakan Desa. Kemudian dimekarkan menjadi 3 Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala/ Kadus. Penduduk Karang Bindu secara umum terdiri atas bermacam suku yang ada di Indonesia, antara lain adalah suku Jawa, Batak, Minang, Rambang, Melayu dan OI dengan tradisi dan adat istiadat yang sampai sekarang masih dilestarikan.90

## Letak dan Luas Desa

Letak wilayah merupakan keadaan atau titik lokasi beradanya suatu wilayah. Letak suatu wilayah yang stategis akan memberikan kontribusi pengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Selain letak wilayah akanberpotensi mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan daerah tersebut.

Karang Bindu memiliki luas wilayah 505 Ha. Karang Bindu ini dihuni oleh lebih dari

1.146 orang laki-laki dan 908 orang perempuan pada Tahun 2022. Karang Bindu ini memiliki salah satu tempat wisata Danau alami sederhana dipinggiran pemukiman kawasan Karang Bindu dengan air yang terus mengalir, tempat Wisata ini disebut “Danau Bujoan”. Lokasinya tidak terlalu jauh masuk kedalam desa kira-kira bisa ditempuh selama 15 menit dengan berjalan kaki dari titik kantor Desa. Mayoritas masyarakat di Karang Bindu memiliki kebun karet dan berprofesi sebagai Petani karet.

Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Secara Geografis Terletak Antara Garis Bujur -3.539171 Garis Lintang 104.2582 dengan Batas-Batas Sebagai Berikut91:

1. Sebelah Utara : Desa Karangan
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjung Rambang
3. Sebelah Barat : Desa Baru Rambang
4. Sebelah Timur : Desa Talang Batu

Desa Karang Bindu Mempunyai Wilayah seluas 9700 km2 atau sekitar 35,23% dari luas Kecamatan Rambang Kapak Tengah yang berjarak kurang lebih 1 km jarak yang ditempuh menuju ke ibu kota kecamatan Rambang Kapak Tengah, kurang lebih 25 km jarak tempuh dari Desa Karang Bindu ke ibu kota Kabupaten Prabumulih dan lebih kurang 106 km jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi92

## Visi dan Misi Desa Karang Bindu

Visi dan Misi desa Karang Bindu Yaitu: Bersama-Sama Menuju Desa Karang Bindu yang Terbaik, Transparansi, Empati, Religius, Berprestasi, Aspiratif, Inovatif dan kekeluargaan sementara misinya adalah sebagai berikut:

* 1. Semua Pelayanaan di Kantor desa Gratis

89 Wawancara dengan H. Ali Mangku (Toko Masyarakat Desa Karang Bindu) Pada Pukul 09.00 WIB Hari Minggu, 30 juli 2023

90 Wawancara dengan M. Subri (Toko Masyarakat Desa Karang Bindu) Pada Pukul 14.00 WIB Hari Senin, 31 Juli 2023

91 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Prabumulih, *Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)* (Tanjung Rambang: 2019).

92 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Prabumulih, (Tanjung Rambang: 2019).

* 1. Pembangunan Infrastruktur yang Adil dan Merata di semua dusun di desa Karang Bindu
	2. Gratis Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Seluruh Masyarakat desa Karang Bindu yang Iuran PBB nya dibawah Rp.20.000
	3. Pengandaan dan Pembangunan Lapangan Olahraga Volley Ball, Futsal dan Badminton secara Permanen dan bertaraf Nasional untuk Mendorong Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Masyarakat desa Karang Bindu
	4. Pembangunan Internet desa Secara Mandiri Lewat Badan Usaha Milik desa dengan Menggandeng Operator BUMN sebagai Wadah Belajar Siswa dan Siswi desa Karang Bindu dalam Pengembangan sistem Pembelajaraan Secara Online
	5. Menciptakan Lingkungan Masyarakat yang Aman dengan Mengaktifkan Poskamling disetiap dusun
	6. Mendorong Terciptanya Masyarakat yang Agamis dengan Memakmurkan Masjid dan Mengaktifkan Pengajian
	7. Menyediakan Ruang Bagi Masyarakat yang ingin Memberi Saran dan Kritik demi Kemajuan desa Karang Bindu
	8. Menambah Fasilitas Mobil Pengangkut Sampah untuk tiap-tiap dusun guna Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa
	9. Memberikan Insentif Tambahan untuk Kader Posyandu, Guru Paud, Guru Ngaji sesuai Peraturan Perundang-undangan
	10. Meningkatkan Peran Lembaga desa atau Kemasyarakatan
	11. Mengadakan Senam Pagi Bersama Setiap Hari Minggu di Lapangan Danau Wisata Bujokan desa Karang Bindu untuk Kesehatan serta Menjalin Silaturahmi Masyarakat desa Karang Bindu
	12. Mengaktifkan Kegiatan Majelis Taklim Remaja atau Pemuda dalam Rangka Meningkatkan Ukhuwah Islamiah
	13. Mendorong Peningkatan PAD desa Karang Bindu melalui Bumdes untuk dipergunakan dan di manfaatkan oleh Seluruh Lapisan Masyarakat secara Adil dan Merata
	14. Melanjutkan Program Penerangan Lampu Jalan disetiap Dusun secara Merata
	15. Mendirikan Koperasi unit desa untuk Membantu Industri Kecil Menengah (IKM) juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Karang Bindu dalam Mengembangkan Usahanya Masing-masing.

## Aset Infrastruktur

Fasilitas umum berupa bangunan fisik dan sosial sebagai kebutuhan dasar fisik masyarakat, berfungsi untuk layanan masyarakat secara umum agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik disebut fasilitas infrastruktur. Fasilitas infrastruktur disajikan adalah semua struktur dan fasilitas umum yang ada di Desa Karang Bindu, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Table1.1 Aset Infrastruktur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Bangunan | Jumlah (buah) |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Masjid | 3 |
| 2. | Kantor Desa | 1 |
| 3. | UPT Puskemas | 1 |
| 4. | Rumah/kantor praktekdokter | 1 |
| 6. | Gedung SD | 1 |
| 7. | Gedung PAUD | 1 |
| 8. | Tempat pemakaman | 1 buah denganluas 1 ha |
| 9. | Gedung Balai Desa | 1 |

Sumber: Profil Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, 2022.

## Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Gambaran demografi Desa Karang Bindu berisi tentang penjelasan dan tabel mengenai kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, mata pencarian penduduk dan jumlahnya. Penduduk sebagai subjek pembangunan mempunyai peran penting dalam pembangunan dan data penduduk sangatlah penting sebagai indikator keberhasilan proses pembangunan tersebut. Desa Karang Bindu mempunyai jumlah penduduk 1.499 orang, untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel jumlah penduduk, diantaranya adalah sebagai berikut;

* 1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

## Tabel 1.2

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Karang Bindu, 2021 dan 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Laki-Laki(jiwa) | Perempuan(jiwa) | Jumlah(jiwa) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | 2021 | 754 | 747 | 1.501 |
| 2. | 2022 | 754 | 745 | 1.499 |
| PertumbuhanPenduduk (%) | 1,5% | 2,5% | 2,01% |

Sumber: Profil Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, 2022 Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah penduduk Laki-Laki lebih banyak yaitu 754 jiwa

atau sekitar 51% dibandingkan dengan jumlah penduduk Perempuan hanya 745 atau sekitar 49% jiwa dengan selisih 9 jiwa dan persentase perkembangan dari tahun sebelumnya untuk laki-laki 5,07% sedang persentase perkembangan jenis kelamin perempuan sebesar 3,14%. Seperti desa-desa lain jumlah kepala keluarga jenis kelamin

laki-laki lebih banyak dibandingan perempuan, baik pada tahun 2021 maupun pada tahun 2022.

* 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

## Tabel 1.3

**Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Karang Bindu, 2021 dan 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Laki-Laki (KK) | Perempua n(KK) | Jumlah (KK) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | 2020 | 207 | 185 | 392 |
| 2. | 2021 | 219 | 205 | 424 |
| PertumbuhanPenduduk (%) | 0,9% | 5,5% | 1,4% |

Sumber: Profil Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, 2022 Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah kepala keluarga laki-laki lebih banyak yaitu 219

atau sekitar 60% dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga perempuan hanya atau sekitar 40%. dengan selisih 14 dan persentase perkembangan dari tahun sebelumnya untuk kepala keluarga laki-laki 0,9% sedang persentase perkembangan kepala keluarga perempuan sebesar 5,5%.

* 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

## Tabel 1.4

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karang Bindu, 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Mata Pencarian | Jumlah |
| *1* | *2* | *3* |
| 2. | Pegawai Negeri Sipil | 17 orang (16,2%) |
| 3. | Petani | 926 orang (35%) |
| 4. | Bidan Swasta | 3 orang (1%) |
| 5. | Guru Swasta | 16 orang (13,5%) |
| 6. | Pedagang Keliling | 21 orang (19,1%) |
| 7. | Tukang Kayu | 10 orang (9,8%) |
| 8. | Wiraswasta | 217 orang(30,6%) |
| Jumlah : | 1.210 orang(100%) |

Sumber: Profil Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, 2022 Berdasarkan Tabel di atas mata pencarian masyarakat yang tinggi yaitu pada

sektor Pertanian yaitu buruh usaha perkebunan Karet yaitu sebanyak 926 orang atau sekitar 35% dan mata pencarian yang terendah adalah bidan swasta yaitu hanya 3 orang atau sekitar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karang Bindu mayoritas sebagai tenaga buruh harian baik di sektor pertanian selaras dengan tingkat pendidik masyarakat setempat yang mayoritas tamatan sekolah dasar (SD) dan tidak tamat sekolah dasar.

* 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

## Tabel 1.5

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Umur | Jenis Kelamin |
| Laki-laki | Perempuan |

Sumber: Profil Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, 2022 Berdasarkan Tabel di atas, jumlah penduduk tertinggi pada umur 11-20 tahun

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | 0 - 12 bulan | 45 jiwa(1,2%) | 59 jiwa(1,6%) |
| 2. | 1- 5 tahun | 424 jiwa(11,5%) | 294 jiwa(8,1%) |
| 3. | 6 - 10 tahun | 476 jiwa(14,5%) | 481 jiwa(13,3%) |
| 4. | 11 - 20tahun | 798 jiwa(21,7%) | 831 jiwa(23%) |
| 5. | 21 – 30tahun | 654 jiwa(17,8%) | 641 jiwa(17,7%) |
| 6. | 31 – 40tahun | 621 jiwa(16,9%) | 581 jiwa(16%) |
| 7. | 41 – 55tahun | 344 jiwa(9,3%) | 342 jiwa(9,4%) |
| 8. | 56 – 75tahun | 302 jiwa(9,7%) | 361 jiwa(9,9%) |
| 9 | ≥ 75 tahun | 6 jiwa(0,1%) | 23 jiwa(0,6%) |
| Jumlah: | 3.670 jiwa(100%) | 3.203 jiwa(100%) |

yaitu 798 orang jenis kelamin laki-laki atau sekitar 21,7% dan 831 orang jenis kelamin perempuan dengan total keseluruhan 2 3 % . Berikutnya pada umur 21- 30 tahun yaitu 654 orang jenis kelamin laki-laki atau sekitar 17,8% dan 641 orang jenis kelamin perempuan dengan total keseluruhan 17,7%. Ini menunjukkan bahwa pada umur produktif jumlah penduduknya cukup tinggi. Dan jumlah penduduk terendah pada ≥ 75 tahun yaitu 6 orang jenis kelamin laki-laki dan 23 orang jenis kelamin perempuan dengan total keseluruhan 0,6%.

## Struktur Pemerintahan Desa Karang Bindu

Mengenai Struktur Pemerintahan yang ada di Desa Karang Bindu umumnya tidak berbeda dengan Pemerintahan yang ada di Desa-Desa lain. Desa Karang Bindu terbagi atas III dusun yang mana dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa Karang Bindu93.

## Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

93 Sumber data Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih Tahun

2022



## Fungsi Pemerintah Desa Karang Bindu

1. Kepallal Desal secalral umum bertugals menyelenggalralkaln Pemerintalhaln Desal, melalksalnalkaln Pembalngunaln Desal, pembinalaln kemalsyalralkaltaln Desal, daln pemberdalyalaln malsyalralkalt Desal. Dallalm halk daln wewenalngnyal seoralng Kepallal Desal berhalk untuk mengalngkalt daln memberhentikaln penjalbalt-penjalbalt desal.
2. Sekertalris Desal Berfungsi sebalgali pelalksalnal urusaln suralt menyuralt, kealrsipaln daln lalporaln,daln sebalgali pelalksalnal urusaln keualngaln.sertal sebalgali pelalksalnal urusaln aldministralsi pemerintalhaln, pembalngunaln, daln kemalsyalralkaltaln. Dallalm melalksalnalkaln tugals daln fungsinyal sekretalris desal/keluralhaln alkaln dibalntu oleh Kepallal Urusaln. Merekallalh yalng menalngalni pelalyalnaln ketaltalusalhalaln yalng balik gunal membalntu Sekertalris Desal.
3. Kalsi Pelalyalnaln memiliki fungsi melalksalnalkaln penyuluhaln daln motivalsi terhaldalp pelalksalnalaln halk daln kewaljibaln malsyalralkalt daln meningkaltkaln upalyal palrtisipalsi malsyalralkalt, pelestalrialn nilali sosiall budalyal malsyalralkalt, kealgalmalaln, daln ketenalgalkerjalaln.
4. Kepallal Seksi (Kalsi) Pemerintalhaln Desal memiliki fungsi melalksalnalkaln malnaljemen taltal praljal Pemerintalhaln, menyusun ralncalngaln regulalsi (Alturaln) desal, pembinalaln malsallalh pertalnalhaln, pembinalaln ketenteralmaln daln ketertibaln, pelalksalnalaln upalyal perlindungaln malsyalralkalt, kependudukaln, penaltalaln daln pengelolalaln wilalyalh daln pendaltalaln daln pengelolalaln Profil Desal.
5. Kalur Keualngaln mempunyali fungsi melalksalnalkaln urusaln Pengurusaln aldministralsi keualngaln, Aldministralsi sumber-sumber pendalpaltaln daln pengelualraln, Verifikalsi aldministralsi keualngaln, daln Aldmnistralsi penghalsilaln Kepallal Desal, Peralngkalt Desal, BPD, daln lembalgal pemerintalhaln desal lalinnyal.
6. Kalur Perencalnalaln Desal memiliki fungsi mengkoordinalsikaln urusaln perencalnalaln menginventalrisir daltal-daltal dallalm ralngkal pembalngunaln, menyusun rencalnal alnggalraln

pendalpaltaln daln belalnjal desal, evallualsi progralm, melalkukaln monitoring; daln penyusunaln lalporaln.

1. Kalur Pembalngunaln berfungsi melalksalnalkaln pembalngunaln salralnal pralsalralnal perdesalaln, pembalngunaln bidalng pendidikaln daln kesehaltaln daln tugals sosiallisalsi sertal motivalsi malsyalralkalt di bidalng budalyal, ekonomi, politik, lingkungaln hidup, pemberdalyalaln kelualrgal, pemudal, olalhralgal, daln kalralng talrunal.
2. Kalur Usalhal daln Umum memiliki fungsi melalksalnalkaln urusaln ketaltalusalhalaln seperti taltal nalskalh, aldministralsi suralt menyuralt, alrsip, daln ekspedisi, penaltalaln aldministralsi peralngkalt Galmpong, penyedialaln pralsalralnal peralngkalt Galmpong daln kalntor daln penyialpaln ralpalt, pengaldministralsialn alset, inventalrisalsi, perjallalnaln dinals, daln pelalyalnaln umum
3. Kepallal Dusun bertugals membalntu Kepallal Desal dallalm pelalksalnalaln tugalsnyal di wilalyalhnyal. Kepallal Dusun memiliki fungsi membinal ketenteralmaln daln ketertibaln, melalksalnalkaln upalyal perlindungaln malsyalralkalt, mobilitals kependudukaln, daln menaltal daln mengelolal wilalyalh, membalntu Kalsi daln Kalur Pelalksalnal Kegialtaln Alnggalraln (PKAl) dallalm pelalksalnalaln pengaldalaln balralng/jalsal dallalm hall sifalt daln jenis kegialtalnnyal tidalk dalpalt dilalkukaln sendiri, mengalwalsi pelalksalnalaln pembalngunaln di wilalyalh kerjalnyal, sebalgali pelalksalnalaln pembinalaln kemalsyalralkaltaln dallalm meningkaltkaln kemalmpualn daln kesaldalraln malsyalralkalt dallalm menjalgal lingkungalnnyal malsing-malsing daln melalkukaln upalyal-upalyal pemberdalyalaln malsyalralkalt dallalm menunjalng kelalncalraln penyelenggalralaln pemerintalhaln daln pembalngunaln Desa.

# BAB IV HASIL PENELITIAN

## Pelaksananan Kerjasama Bagi Hasil Ternak Lele Antara Pemerintah Dengan Warga Sebagai Pengingon Di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengan Prabumulih

Manusia adalah pelaku ekonomi dengan segala jenis dan bentuk pemenuhan kebutuhan dalam kesehariannya. Sehingga manusia dalam berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melahirkan berbagai cara yang ditempuh diantaranya adalah melakukan kerjasama seperti yang terjadi di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

Bagi masyarakat Desa Karang Bindu yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, mempunyai Ternak lele adalah impian mereka namun karena faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak dapat memiliki ternak lele sendiri, adapun yang memiliki modal tetapi karena kesibukan sehingga tidak bisa merawat ternak sendiri, dengan melakukan kerja sama pengembangbiakan ternak lele kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, dalam hal ini ternak dapat dijadikan sebagai tabungan yang mana lele bisa diandalkan jika sewaktu - waktu mereka membutuhkan uang dan bisa dijadikan usaha sampingan ketika mereka pulang dari sawah atau kebun, mengingat letak lahan dan kondisi geografis dan lahan yang tersedia memberikan peluang besar untuk berkembangnya ekonomi masyarakat, salah satunya yaitu usaha ternak lele.

Dalam proses bagi hasil ternak lele yang dilakukan peternak di Desa Karang Bindu yaitu pemerintah Desa Karang Bindu memberikan modal berupa bibit ikan lele serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti kolam dan lain lain kepada pengelola yaitu warga desa Karang Bindu. Dan ada dua macam sistem bagi hasil yang dilakukan warga Desa Karang Bindu saat ini yaitu, pertama yaitu bagi tiga (2/1), artinya apabila lele tersebut sudah siap untuk di panen dan dijual ke pengepul barulah proporsi pembagiannya dilakukan, yakni satu 1/3 bagian dari uang yang dihasilkan dari penjualan tersebut menjadi milik pemerintah desa dan pengelola yaitu warga Desa Karang Bindu mendapatkan sisa dari 1/3 yang telah diberikan kepada pemerintah Desa Karang Bindu tersebut. Sedangkan pengelola bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua dengan cara bagi dua, artinya apabila lele tersebut sudah siap penen dan di jual ke pengepul maka pihak pertama yaitu pemerintah Desa Karang Bindu mendapatkan 70% dari hasil yang didapatkan dari penjulan lele tersebut dan pihak kedua yaitu pengelola juga mendapatkan 30% dari hasil penjualan dengan catatan bahwa dalam pengelolaan ternak lele dari bibit sampai panen biayanya ditanggung pemerintah Desa Karang Bindu.

Masyarakat Desa Karang Bindu mayoritas petani dimana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ditempuh dengan cara melakukan kerjasama salah satunya adalah kerja sama dalam bidang pengembangbiakan ternak lele.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepala Desa Karang Bindu bernama Iin Saputra mengatakan bahwa :

“Potensi unggulan yang ada di Desa Karang Bindu ini adalah potensi pertanian dan ternak lele. Sebab dengan adanya ternak lele dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam mengelola pertanian.”94

94 Hasil wawancara kepada Bapak Iin Saputra selaku kepada Desa Karang Bindu

37

Dari keterangan diatas, peneliti melihat bahwa pemenuhan hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Karang Bindu bergantung pada pertanian dan peternakan.

Sistem bagi hasil ternak lele yang dilaksanakan masyarakat Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten perabumulih tidak selamanya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya kejelasan saat melakukan proses akad diawal terjadinya bagi hasil ternak lele tersebut. Akad yang dilakukan masyarakat di Desa Karang Bindu berbentuk lisan tidak merupakan tulisan sehingga terkadang akad tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal.

menurut peneliti, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar poin -poin dalam perjanjian tersebut jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diproses mengenai pelanggaran atau kerugian- kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian hanya secara lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian pemilik modal dan pemelihara.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan pengelola tau warga, yang diterapkan di Desa Karang Bindu ini sudah ada sejak dahulu, sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Iin Saputra

“sistem kerjasama seperti ini sudah lama dilakukan pemerintah desa dan warga terdahulu, sehingga bersifat tradisi, sehingga masyarakat di Desa Karang Bindu ini hanya mengikuti tradisi atau meneruskan apa yang dilakukan oleh orang- orang terdahulu”95

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil kerja sama antara pemerintah Desa dan pengelola atau warga di Desa Karang Bindu selama ini sudah dilakukan sejak lama, atau turun- temurun dari orang tua mereka terdahulu. Jadi sistem kerjasama antara pemilik ternak dan pengelolah dalam bidang peternakan yang dilakukan di Desa Karang Bindu sudah menjadi tradisi masyarakat. Kerjasama antara pemrintah desa dan pengelola atau warga dalam bidang pengembangbiakan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Bindu selama ini terkesan saling menguntungkan. Dikatakan saling menguntungkan disini adalah masyarakat yang tidak memiliki modal untuk berternak lele dapat beternak dengan menggunakan modal yang diberikan oleh pemerintah Desa Karang Bindu agar dapat terbantu dengan adanya kerjasama seperti ini, serta mendapatkan hasil yang sama sama meguntungkan dari kedua belah pihak.

Selain kerja sama antara pemerintah dan warga ada juga kerjasama yang dilakukan antara warga yang mempunyai uang lebih serta mempunyai niat untuk berternak lele namun tidak memiliki waktu untuk mengurusnya sehingga ia memberikan modal tersebut untuk warga lainnya untuk dijadikan modal usaha ternak lele dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Sebagaimana ungkapan salah satu pemilik ternak terbanyak di Desa Karang Bindu yakni bapak Muhammad Yusuf

“iya alhamdulillah saya mempunyai sedikit uang tabungan yang saya tabung untuk melakukan kegiatan ternak lele namun saya tidak ada waktu untuk merawat dan mengurus ternak lele tersebut dan banyak kegitan lainya yang tidak bisa saya

95 Hasil wawancara kepada Bapak (Iin Saputra) selaku kepada Desa Karang Bindu

tinggalkan sehingga saya memberikan sedikit tabungan saya tersebut untuk dikelola oleh salah satu warga desa Karang bindu yang sudah saya percayai dan hasilnya akan dibagi setelah panen”96

Adapun bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemerintah desa dan pengelola atau warga pada saat melakukan kerjasama bagi hasil di Desa karang bindu ini dilakukan secara lisan sebagaimana pernyataan bapak selaku pengelola ternak lele pada saat wawancara :

“perjanjian bagi hasil dalam kerjasama ini tidak ada yang tertulis semuanya dalam bentuk lisan saja, karena kita sudah saling percaya, dan ini sudah dilakukan sejak dulu jadi menurut saya tidak apa- apa tidak secara tertulis”97

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan peternak berbentuk lisan. Peternak yang ada di Desa Karang Bindu kebanyakan melakukan kerjasama bagi hasil ini berdasarkan kepercayaan, tidak menentukan bahwa harus kerabat terdekat, yang intinya adalah siapapun yang dapat dipercaya dan betul- betul mampu dan berpengalaman dalam mengelola hewan ternak.

Keuntungan bagi hasil antara Pemirintah Desa dan warga dalam kerja sama ternak lele sangat dirasakan oleh warga Desa Karang Bindu yaitu dapat membantu perekonomian warga yang kurang mampu dan tidak memiliki modal untuk berternak lele. Hal ini sesuai dengan wawancara terhadap bapak Ahmat Saleh selaku peternak lele :

“dengan adanya kerjasama ini saya merasa sangat senang karena dapat membantu orang lain dan saya pun terbantu yang mana awalnya sapi- sapi saya tidak terurus dengan baik sekarang sudah ada yang urus dan saya tinggal menunggu hasilnya”98

Selain keuntungan di atas juga terdapat kerugian yang didapatkan dari hasil peternakan ikan lele tersebut Kerugian yang dirasakan oleh pengelola yaitu ketika lele yang dipelihara terserang penyakit, mati dan hilang. Apabila lele tersebut sakit, pengelolalah yang menanggung biaya pengobatannya atau dalam kata lain pengelolah bertanggung jawab sepenuhnya atas kesehatan ternak lele tersebut. Adapun apabila ternak tersebut ada yang mati maka pengelola tidak dituntut untuk mengganti ternak lele tersebut. Dan apabila ternak lele tersebut ada yang hilang pengelola lah yang menanggungnya karena menurut pemberi modal dari kasus yang telah terjadi selama ini merupakan akibat kelalaian pengelola.

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksananan Kerjasama Bagi Hasil Ternak Lele Antara Pemerintah Dengan Warga Sebagai Pengingon Di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengan Prabumulih

Islam sangat mementingkan masalah muamalah, termasuk mengatur masalah ekonomi , sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam hidupnya, bukan hanya kehidupan di dunia melainkan juga kehidupan di akhirat kelak. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar sebagaimana yang telah diatur oleh Allah, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan

Bindu

96 Hasil wawancara kepada bapak Muhammad Yusuf selaku pemilik ternak terbanyak di Desa Karang

97 Hasil wawancara kepada Bapak Efriansyah selaku pengelola ternak lele

98 Hasil wawancara kepada Bapak Ahmat Saleh selaku peternak lele

kehidupan seseorang menjadi bernilai. Karena manusia adalah makhluk sosial maka manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani kehidupannya maupun kebutuhan hidupnya, manusia membentuk kelompok sosial diantara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan, begitupun pada masyarakat Desa Karang Bindu mereka mengadakan kerjasama dalam pengembangbiakan ternak lele dengan cara bagi hasil sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi di Desa tersebut.

Istilah bagi hasil dalam Hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu *Mudarabah ,Musyarakah, dan Musāqoh*. Akan tetapi untuk istilah *al-muzaraʻah* dan *Musāqah* lebih sering digunakan dalam hal pembagian bagi hasil perkebunan maupun pertanian. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa permasalahan bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak lele yang terjadi di Desa Karang Bindu lebih dominan sebagai sistem bagi hasil *mudarabah al-muṭlaqah.* Yang mana pengertian *mudarabah al-muṭlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelolah tanpa memberikan batasan.

Dalam Ekonomi Syariah ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah : adanya akad atau perjanjian yang jelas. Adanya sikap saling tolong – menolong antara manusia satu dan lainnya. Kemudian adanya sikap adil, sikap jujur, serta sikap amanah dan tanggung jawab.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele sudah diatur dalam prinsip- prinsip ekonomi syariah yang harus diterapkan, karena prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci dari sesuai atau tidaknya, adil atau tidaknya akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Maka, peneliti akan menguraikan tentang prinsip- prinsip ekonomi syariah :

* 1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah swt memerintahkan untuk berbuat adil dalam Q.S. An-Nahl (90):16

إِنَّ ٱَََّّ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلِْحْْٰسَنِ وَإِيتَا˜ئِ ذِى ٱلْقُرْبَٰى وَيَنَُْٰى عَنِ ٱلْفَحْشَا˜ءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُْْ لَعَلَّكُْْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.99*

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam *Kitab Al-Misbah* bahwa ayat ini Allah swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri Nya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa, sesungguhnya Allah swt secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba- hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga

99 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya New Cordova (Syamil Qur’an), (Bandung, 2012).,106.

pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah swt melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina dan homo seksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai denga nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Allah swt memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebijakan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.100

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia. Baik dibidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi. Didalam hukum ekonomi syariah telah dibuat berbagai macam aturan-aturan dalam melakukan muamalah, hukum tersebut dibuat agar dalam bermuamalah tidak ada terjadi unsur-unsur yang tidak baik seperti, penipuan, adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam bermuamalah tidak hanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Begitupun dalam melakukan kerja sama pengembangbiakan ternak lele ini, tidak boleh berlaku curang atau berbuat semau- maunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada, sistem keadilan yang dimaksud disini ialah dalam bagi hasil ternak lele tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal terjadinya akad kerjasama, dan saling terbuka hingga terjalin kerja sama yang baik.

Masyarakat Desa Karang Bindu melakukan bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele ini belum sesuai dengan prinsip keadilan, dimana ada beberapa pengelola ternak yang merasa di rugikan, dan adanya rasa keterpaksaan meskipun cara bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi di Desa Karang Bindu ini sudah dilakukan secara turun temurun, sebagaimana ungkapan salah satu pengelolah ternak lele sebagai berikut :

“kadang- kadang tiap mau panen harus selalu berjaga jaga karena banyak sekali masyarat yang nakal untuk melakukan pencurian terhadap beberapa lele yang terdapat didalam kolam. Apabila terjadi pencurian maka hal tersebut ditanggung oleh pihak pengelola dan dianggap kesalahan dari pihak pengelola ternak lele. Ini berdasarkan pengalaman saya, pada perjanjian awal tidak ada dibahas bahwa apabila ternak lele ada yang hilang yang tanggungjawab penuh adalah saya, ya..merasa dirugikan sih, hanya mau bagaimana lagi, inikan cara kerjasama yang sudah turun menurun yang dilakukan di Desa Karang Bindu, jadi agar resiko ini tidak terjadi kami harus melakukan penjagaan maksimal”101

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam kerjasama dalam pengembangbiakan ternak lele di Desa Karang Bindu masih jauh dari prinsip keadilan karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, apabila terjadi resiko dalam memelihara ternak sapi tersebut, hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan pada saat melakukan bagi hasil dalam kerjasama pada awal akad.

* 1. Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan)

100 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004). 323

101 Hasil wawancara kepada Bapak Amiril Mukminin selaku pengelola ternak lele

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2):83:

وَاِذْ اَخَذْاََّ مِيْاَْقَ بَنِ ˜يْ اِسْرَاۤءِيَُْ لََ تَعْبُدُوْنَ اِلََّ هاللَّٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَااًَّ وَّذِى الْقُرْٰبى وَالْيَٰتٰمى وَالْمَٰسكِيْنِ وَوَُْلُوْا لِلنَّاِِ حُسْنًا وَّاَيَِْمُوا الصَّٰلوةَ وَٰاتُوا الزَّٰكو ةَِّۗ ثَُّْ تَوَلَّيْتُْْ اِلََّ لََِيْلًً ِ'منْكُْْ وَاَتَُّْْْ مُّعْرِضُوْنَ

Artinya:

*Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.102*

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah menafsirkan makna iḥsan pada ayat diatas: mengemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, menurutnya kata iḥsan digunakan untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu kata iḥsan lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri anda. Sedangkan iḥsan adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda. Adil adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedangkan iḥsan adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.103

Merujuk dari makna prinsip iḥsan sendiri yang pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan makna yang kedua, yaitu perbuatan baik. Dilihat dari tujuan terjadinya pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele ini tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah desa saja melainkan sangat membantu kemajuan ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat yang ekonomi lemah, yang awalnya tidak memiliki modal untuk membeli bibit serta kolam lele. Dengan adanya kerjasama ini pengelola yang tidak memiliki modal bisa memilikinya dari hasil kerjasama tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kepala desa karang bindu selaku pemberi modal :

“dengan adanya kerjasama ini saya merasa sangat senang karena bisa membantu orang lain dan merasa terbantu karena awalnya sapi- sapi saya tidak terurus dengan baik sekarang sudah ada yang urus dan saya tinggal menunggu hasilnya”104

Berdasarkan tujuan bagi hasil dalam kerjasama dalam pengembangbiakan ternak lele di Desa Karang Bindu ini tidak hanya mengambil manfaat dari pengelolah ternak saja akan tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia, tujuan tersebut sesuai dengan prinsip ihsan dalam prinsip ekonomi syariah.

* 1. Prinsip *Al-Mas’uliyah* (pertanggung jawaban)

Prinsi *Al-Mas’uliyah* meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas’uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam

(2):83

102 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-quran surah Al-Baqarah

103 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta,Lentera Hati)., 237

104 Hasil wawancara kepada Bapak Iin Saputra selaku kepala Desa Karang Bindu selaku pemilik modal

masyarakat (*mas’uliyah al-mujtama’*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibanya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab Pemerintah (*mas’uliyah aldaulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.105

Rasa tanggungjawab merupakan perilaku yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggungjawab terhadap segalah sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitu pula dalam melakukan kerjasama bagi hasil, seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain, harus bertanggung jawab, dan mengelola dengan sebaik- baiknya. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele di Karang Bindu, peneliti melihat adanya sikap bertanggung jawab yang dimiliki oleh para peternak, khusunya pengelola ternak lele yang diberika kepercayaan, para peternak sangat bertanggung jawab dalam menjalankan proses Bagi hasil dalam kerjasama pegembangbiakan ternak lele di Karang Bindu kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih. Dengan memiliki sikap bertanggung jawab pada peternak sehingga kerjasama tersebut terjalin secara terus menerus.

* 1. Prinsip *Al-Kifayah* (sufficiency)

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr (7):59

مَا أَفَاءَ اَّللُّٰ عَلَٰى رَسُولِهِ مِنْ أَهُِْ الْقُرَٰى فََِِّلَلِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيُِ كَيْ لََ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الَْأغْنِيَاءِ مِنْكُْْ ۚ وَمَا آتَاكُُْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا اَََُّكُْْ عَنْهُ فَاتََّْوُُا ۚ وَاتَّقُوا اَّللَّٰ ۖ إِنَّ اَّللَّٰ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.106

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat diatas dimaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.107

Hal ini sesuai dengan wawancara kepada Kepala Desa Karang Bindu selaku pemberi modal :

“dengan adanya kerjasama ini saya merasa sangat senang karena dapat membantu warga desa yang tidak memilki modal dan desa pun jadi terbantu karena memilki pemasukan yang hasilnya dapat dialokasikan untuk pembangun desa.”108

(7):59

105 Sjaichul Hadi, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial.,46-49.

106 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-quran surah Al-Hasyr

107 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta, Lentera Hati.2004).112.

108 Hasil wawancara kepada Kepala desa Karang Bindu Selaku Pemberi modal

Dan juga sesuai dengan hasil wawancara dengan pengelola ternak yang bernama bapak Efriansyah:

“saya merasa terbantu sebab selain dari keuntungan bagi hasil dari kerjasama ini, saya juga mendapatkan pengahasilan tambahan yang dapat membantu ekonomi keluarga saya guna untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.”109

Tujuan bagi hasil dalam kerja sama pengembang biakan ternak lele di Desa Karang Bindu dapat membantu memperbaiki ekonomi masyarakat utamanya yang tergolong ekonomi menengak kebawah. Sehingga dilihat dari tujuan kerjasamanya maka sesuai dengan prinsip Al-Kifayah.

* 1. Prinsip Al-wasaṭiyah (keseimbangan).

syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al- Qur’an Surah Al-Isra’ (17):29 :

وَلََ تَجْعَُْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَٰى عُنُقََِ وَلََ تَبْسُطْاَُ كَُُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya:

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.110*

Menurut Muhammad Quraish Shibab dalam kitab Al-Misbah makna dalam ayat ini Allah berfirman janganlah engkau enggan untuk mengulurkan tanganmu dalam berbuat kebaikan, seakan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu yang kuat terikat kelehermu sehingga engkau tak dapat mengulurkannya dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfaq karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, tercela oleh diri sendiri dan orang lain karena boros, berlebih lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena kehabisan harta. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan hikmah yang sangat luhur, yaitu kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut sedangkan kedermawan adalah pertengahan antra pemborosan dengan kekikiran.111

Dilihat dari proporsi bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele ini sudah seimbang, dengan adanya dua cara pembagian proporsi bagi hasil ternak yang dilakukan di Desa Karang Bindu.

Hal ini sesuai dengan apa yang dekemukakan oleh bapak Amiril Mukminin’ sebagai pengelola :

“cara bagi hasil yang kami jalani dalam kerja sama bagi hasil ini, yaitu bagi dua, jadi setiap sekali panen ikan lele hasilnya akan dibagi dua tetapi sebelum di bagi dua kami akan melakukan perhitungan dulu mengenai biaya perawatan lele

(17):29

109 Hasil wawancara kepada Bapak Efriansyah Selaku Pengelola ternak lele

110 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-quran surah al - Isra’

111 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).,100.

tersebut hingga panen, setelah itu baru kami akan melakukan bagi hasil sesuai kesepakan di awal”.112

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi di Desa Ponggerang ini sudah seimbang karena sudah sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, dan tentunya sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan.

* 1. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
		1. Prinsip transaksi yang diragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
		2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri, pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
		3. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
		4. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
		5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
		6. Prinsip suka sama suka (saling rela).
		7. Prinsip tiada pemaksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.113

Dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran yang mana tidak adanya kejelasan pada awal akad terjadinya perjanjian kerjasama dalam pengembangbiakan ternak lele tersebut. Karena masih ada beberapa pengelola yang merasa dirugikan Ketika terjadi kendala pada saat pemeliharaan dan merasa terpaksa menjalankan aturan tersebut karena memang sudah menjadi tradisi, meskipun cara bagi hasil dalam kerjasama ini sudah menjadi tradisi di daerah tersebut namun dalam prinsip hukum ekonomi syariah saat melakukan akad dalam kerjasama harus tegas, jelas dan pasti agar tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan dan tidak merasa terpaksa dalam melakukan peraturanpada kerjasama akad bagi hasil tersebut.

112 Hasil wawancara kepada Bapak Amiril Mukminin selaku pengelola ternak lele

113 Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial.*,44-45.

# BAB V PENUTUP

## Kesimpulan

Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

Maka peneliti menyimpulkan beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut

:

* 1. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak lele yang dijalankan di Karang Bindu yaitu memiliki dua cara pembagian keuntungan cara yaitu:
		1. pemilik modal/pemerintah Desa Karang Bindu dan pengelola ternak melakukan cara bagi dua artinya ketika lele tersebut dipanen maka hasil dari penjualan lele tersebut akan dibagi dua dalam bentuk pecahan uang setelah perhitungan biaya perawatan dan lain lainnya.
		2. bagi tiga atau (2/1), pembagian keuntungan atau bagi hasil terjadi apabila peternak lele siap menanggung semua biaya perawatan dan pasilitas penunjang lainnya sampai lele tersebut dipanen maka peternak mendapatkan bagian 1 kali lebih banyak dari pada pemberi modal yaitu pemerintah Desa Karang Bindu.
	2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, cara bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Karang Bindu dilihat dari tujuan terjadinya kerjasama pengembangbiakan ternak lele ini yaitu didasari tolong menolong dalam kebaikan. Dimana dengan adanya kerjasama pengembangbiakan ternak lele ini dapat membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah, pemilik ternak pun mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama ini, dan juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat secara merata.

Namun pada praktiknya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau rukun dan syarat akad mudarabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengenai perjanjian pada awal terjadinya akad hanya membicarakan masalah proporsi keuntungan, dan tidak memperjelas jumlah atau nilai modal yang diberikan pada pengelolah serta tidak membicarakan bagaimana apabila terjadi kendala atau kerugian saat proses pemeliharaan ternak lele tersebut, hal ini menimbulkan cacat kehendak dan tergolong kedalam paksaan, karena tidak adanya kejelasan dalam melakukan perjanjian di awal akad.

## Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap akad bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak lele di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih, maka penulis dapat memberikan saran agar pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak lele di Desa Karang Bindu, hendaknya diawal akad menyebutkan berapa modal yang diberikan kepada pengelola, serta memperjelas dan mempertegas poin-poin selama terjadinya kerjasama dalam bagi hasil

pengembangbiakan ternak lele tersebut, seperti berapa proporsi pembagiannya, bagaimana apabila terjadi kerugian dan lain- lain.